

## **Bantuan Teknis Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (Rab) Program Kerja Desa Berbasis Dana Desa**

**Muhammad Taufiq Y.S<sup>1</sup>, Edward Rizky Ahadian<sup>2</sup>, Ihlusul Amal<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Khairun

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Khairun

Email : taufiqys@unkhair.ac.id

### **ABSTRAK**

Pulau Maitara merupakan salah satu kawasan wisata di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang terletak diantara Pulau Tidore dan sekatan Pulau Ternate adalah suatu bongkahan pulau kecil yang alamiah berpenduduk 1900 jiwa dengan keramah-tamahan, budaya dan jiwa sosialnya yang tinggi serta menyimpan kekayaan yang potensial untuk pengembangan sebagai kawasan wisata. Dengan demikian, berdasarkan potensi yang ada di daerah ini, kegiatan dari PKM ini sangat berpeluang besar sebagai upaya peningkatan ekonomi di tingkat keluarga guna mewujudkan kesejahteraan desa. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dialokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp. 328,07 triliun. Pagu Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp. 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Berdasarkan pantauan, selama tahun 2021, secara umum permasalahan dana desa dapat dilihat dari aspek perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa menjadi kewajiban yang harus dilakukan

**Kata Kunci:** Dana Desa, Program Kerja

### **ABSTRACT**

*Maitara Island is one of the tourist areas in the City of Tidore Archipelago, North Maluku Province, which is located between Tidore Island and the border of Ternate Island, is a natural small island with a population of 1900 people with high hospitality, culture and social spirit as well as a wide range of potential wealth for development as a tourist area. Thus, based on the potential that exists in this area, the activities of this PKM have a great opportunity as an effort to improve the economy at the family level in order to realize village welfare. In practice, village funds have been allocated in the state budget since 2015 in the amount of Rp. 20.76 trillion. In the 2015-2020 period, the allocation of village funds through the APBN has reached Rp. 328.07 trillion. The village fund ceiling for 2022 has been set at Rp. 68 trillion and allocated to 74,961 villages in 434 districts/cities throughout Indonesia. Based on monitoring, during 2021, in general village fund problems can be seen from the aspects of planning, management and accountability. This shows that the assistance and supervision of village fund management has not run optimally. Therefore, increasing guidance, assistance and supervision of the management of village funds is an obligation that must be carried out*

**Keywords:** Village Fund, Work Program

## **1. PENDAHULUAN**

Tujuan kegiatan Program Kemitraan pada Masyarakat (PKM) untuk membantu meningkatkan pemahaman mengenai keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, membantu memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan terkait pengelolaan keuangan desa, membantu memberikan bimbingan terkait pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengajuan pencairan keuangan untuk setiap kebutuhan, serta membantu memberikan bimbingan terkait dengan pembuatan Lembar Penanggungjawaban sesuai dengan RAB.

## **2. TARGET LUARAN YANG DICAPAI**

Target luaran dari kegiatan PKM yang dilaksanakan adalah:

- a. Agar setiap keuangan yang ada didesa lebih terstruktur baik dari proses perencanaan, pelaksanaa, hingga laporan penanggungjawaban.
- b. Mampu meminimalisir kecurangan terkait pengelolaan keuangan di desa.
- c. Memudahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengontrol terkait dengan keuangan desa

## **3. METODE PELAKSANAAN**

Bentuk kegiatan adalah bantuan teknis/bimbingan teknis dalam penyusunan rencana anggaran biaya (rab) program kerja desa berbasis dana desa.

Adapun uraian tahapan pelaksanaan program yaitu sebagai berikut:

### **a. Tahap perencanaan**

Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan dan pembekalan tim yang terdiri dari 2 orang dosen dan 5 orang mahasiswa. Selanjutnya menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **b. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dilaksanakan selama dua minggu, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi internal antara dosen dan mahasiswa untuk merumuskan tugas masing- masing ketua dan anggota.

2. Melakukan survei pendahuluan ke lokasi rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Maitara Kota Tidore Kepulauan.
3. Melakukan pertemuan dengan perangkat desa terkait maksud, tujuan, waktu serta manfaat dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
4. Menyusun materi untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pembuatan spanduk kegiatan.

c. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di SDN 1 Maitara Desa Maitara Kota Tidore Kepulauan. Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak kurang lebih 20 orang.

1. Penyampaian Materi

Materi bimbingan teknis mencakup cara penyusunan program kerja desa dan pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) berbasis dana Desa. Kemandirian desa harus dimulai dengan proses perencanaan yang baik serta tatakelola program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan desa yang optimal bukan hanya terkait kesempatan, tetapi menyangkut susunan program dan prioritas kegiatan. Selain itu, dijelaskan juga perlunya dibuat database dan website dari desa/sekolah berbasis IT. Dengan adanya IT, database desa/sekolah bisa tersimpan dengan baik dan terupdate. Kemudian dengan adanya website desa/sekolah, informasi semua kegiatan atau aktifitas di desa/sekolah bisa dibaca secara luas.

2. Diskusi

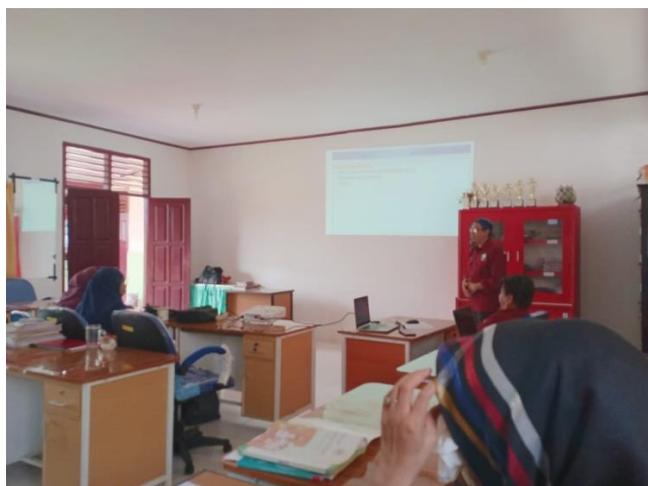
Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan kegiatan diskusi dengan perangkat desa, guru, dan masyarakat Desa Maitara yang hadir.



**Gambar 1.** Penyampaian materi



**Gambar 2.** Peserta Bimbingan Teknis



**Gambar 3.** Diskusi

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kerja Desa

Tujuan menyusun program pembangunan desa yang efektif, efisien, terintegrasi, serta berkelanjutan berdasarkan kajian profil desa. Deskripsi produk program pembangunan desa akan dirumuskan dalam bentuk *roadmap* perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun yang terdiri dari rangkaian pembangunan jangka menengah 5 tahun sebagai bentuk detail penjabaran capaian tujuan utama rencana jangka panjang.



**Gambar 4.** Alur Penyusunan Program Kerja Desa

##### b. Bimbingan Teknis Pembuatan Database

Ada 4 manfaat pembuatan *database*, yaitu:

###### 1. Membantu Pengelolaan Data Desa

Manfaat pertama dari penggunaan *database* adalah untuk membantu pengelolaan data desa. Sesuai dengan fungsi dari *database* yaitu untuk menyimpan dan mengelola data, fungsi utama tersebut tentu akan sangat bermanfaat dalam proses pengelolaan data desa.

Dengan adanya *database*, *desa* dapat menyimpan data yang baru yang disusun sesuai format yang diinginkan. Data yang tersimpan dengan rapi tersebut dapat memudahkan pihak desa dalam mencari data yang dibutuhkan.

## **2. Menjaga Privasi desa**

Desa dapat mengetahui kapan, di mana, dan siapa saja yang masuk ke dalam *database* desa. *Database* telah dilengkapi dengan sistem keamanan ketat sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses informasi di dalamnya demi menjaga privasi data yang desa miliki.

## **3. Meningkatkan Performa Kerja Pegawai**

*Database* dapat diakses oleh banyak orang di waktu yang bersamaan. Hal ini tentu saja akan membantu meningkatkan performa kerja pegawai desa. Coba kita bandingkan dengan cara penyimpanan berkas di dalam satu map *holder* dan data di dalamnya dibutuhkan oleh banyak pegawai. Mereka hanya dapat melihat data tersebut secara bergiliran dan tentu saja cara ini memakan waktu yang lama.

Sama halnya dengan data yang disimpan di dalam komputer namun tidak terhubung ke *database*. Jika ada pegawai dari desa lain yang membutuhkan data tersebut, mereka harus mengirimkannya melalui *email* atau menyalin data ke USB. Oleh karena itu, *database* menjadi solusi yang tepat untuk perusahaan Anda.

## **4. Desa Menjadi Lebih Dikenal Luas**

Dengan adanya *database* desa, diharapkan akan terjadi peningkatan popularitas desa.

### **c. Bimbingan Teknis Pembuatan Website Desa**

Didalam website desa dimuat banyak informasi seperti sejarah desa, visi misi desa, profil desa, pemerintah desa, berita, produk desa, galeri serta laporan anggaran desa. dengan adanya website desa diharapkan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi publik serta promosi potensi-potensi wisata desa dan produk-produk unggulan desa.

Selaras dengan fungsi website desa sebagai media informasi dan promosi. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan pada masa modern sekarang ini, namun tidak semua tempat wisata dapat berkembang dengan baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya tempat wisata adalah kurangnya promosi atau penyampaian informasi kepada

para wisatawan. Dengan menggunakan website resmi desa, pemerintah dapat mengekspos desa ke khalayak luas dengan jaringan internet. Begitulah tujuan pembuatan website desa tidak lain adalah untuk mempublikasikan keberadaan desa ke dunia luar, sehingga mudah untuk diketahui banyak orang, menginformasikan profil dan potensi desa, mempermudah masyarakat luas untuk memperoleh informasi mengenai desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, menjadi wadah dokumentasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, mempromosikan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat desa.



**Gambar 5.** Foto Bersama

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kegiatan Program Kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa.
2. Diharapkan kegiatan bimbingan teknis ini, dapat diterapkan dalam pembangunan konstruksi yang efektif dan efisien dengan perhitungan biaya yang tepat dan ekonomis, namun bangunan konstruksi yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

### **Saran**

1. Perlu dibuatkan *roadmap* program kerja desa jangka panjang.
2. Diharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang melibatkan perangkat

desa, masyarakat dan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Program Studi Ilmu Pemerintahan. (2021). Pedoman Praktek Mata Kuliah Kebijakan Sektor Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Galuh.
- Sujadi, Firman, dkk. (2016). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa (2th ed). Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sujadi, Firman, dkk. (2016). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Administrasi Desa dan Pemberdayaan Desa (3th ed). Jakarta: Bee Media Pustaka